DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2014.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.

Arief, Barda Nawawi dan Muladi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.

Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Hatta, Muhammad. *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Lhokseumawe: FH Unimal Press, 2022.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.

Nasution, Adnan Buyung. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*. Jakarta: Grafiti, 2001.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Alumni, 2009.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Rangkuti, Siti Sundari. *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press, 2000.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2006.

Sunarso, Siswanto. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Sunarso, Siswanto. *Tindak Pidana di Bidang Kehutanan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Wibisana, Andri Gunawan. *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi, dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Penerbit UI Press, 2020.

B. JURNAL, SKRIPSI, DAN KARYA ILMIAH

Fernanda, Bayu. *Pelaksanaan Penegakan Hukum oleh Penyidik Kepolisian terhadap Penadah Kayu Hasil Tindak Pidana Pembalakan Liar di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat*. Skripsi, Universitas Andalas, 2020.

Kasmita, Novriana Rattih. *Tindak Pidana Illegal Logging di Kabupaten Aceh Selatan (Studi Putusan Nomor 119/Pid.B/LH/2018/PN.Ttn)*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2018.

Maulana, Reza. *Penerapan Sanksi Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan Hutan Lindung Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 (Studi di Paya Rebol, Bener Meriah)*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2020.

Naluri, A., Hatta, M., & Johari, J. Kedudukan Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan Di Kawasan Hutan Aceh Utara. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol *6* No. 2, 2023.

Silva, Enjang. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 (Studi Kasus Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima)*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2022.

Tambunan, Rachmad. "Peranan Polisi Kehutanan dalam Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Kehutanan." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 7 No. 1, 2021.

Yulianto, Edi. "Tantangan Penegakan Hukum dalam Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50 No. 3, 2020.

Zainuddin, M. "Analisis Kriminologis terhadap Tindak Pidana Illegal Logging." *Jurnal Ilmu Hukum Legalitas*, Vol. 11 No. 1, 2021.

Zulkifli, Z., & Sastro, M.. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi Di Sektor Kehutanan di Kabupaten Aceh Tengah. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol *10* No.1, 228-249, 2022.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penegakan Hukum Administrasi di Bidang Kehutanan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.12/MENLHK-II/2015 tentang Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.68/Menhut-II/2010 tentang Penetapan Wilayah KPH Aceh.

D. WEBSITE

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Selatan. *Aceh Selatan dalam Angka 2024*. Tapaktuan: BPS, 2024. https://acehselatankab.bps.go.id. Di akses tanggal 2 Oktober 2025.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. *Profil KPH Wilayah VI Aceh dan BKPH Bakongan*. https://www.menlhk.go.id. Di akses tanggal 2 Oktober 2025.

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (GAKKUM KLHK). *Laporan Tahunan Penegakan Hukum Kehutanan Tahun* 2023. https://gakkum.menlhk.go.id. Di akses tanggal 12 Oktober 2025.

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIH). https://peraturan.go.id. Di akses tanggal 12 Oktober 2025.

Tempo.co. Kasus Illegal Logging di Aceh Selatan Masih Marak, Pemerintah Diminta Bertindak Tegas. https://www.tempo.co. Di akses tanggal 4 Oktober 2025.

Antara News. BKPH Bakongan Perkuat Patroli Hutan untuk Cegah Pembalakan Liar di Trumon Timur. https://aceh.antaranews.com. Di akses tanggal 12 Oktober 2025.